

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensial yang meliputi perubahan dalam sikap hidup masyarakat, perubahan struktur sosial, dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan juga merupakan perubahan dalam pembangunan. Adapun salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam pembangunannya adalah menggunakan indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan merupakan suatu gambaran atas dampak yang dihasilkan dari munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi (Wahyudin dan Yuliadi, 2013).

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu menimbulkan dampak bagi kegiatan perekonomian lainnya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang pesat salah satunya yaitu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dan memperluas jumlah masyarakat dengan pendapatan kelas menengah. Adapun dampak negatif yang muncul dari pesatnya pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar apabila dilihat dan dihitung menggunakan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali tidak diikuti dengan pemerataan.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat *trade off* antara pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Apabila pembangunan ekonomi difokuskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang singkat disisi lain pemerataan pendapatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, apabila pembangunan ekonomi difokuskan untuk melakukan pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan didapatkan dalam waktu yang relatif lama (Arif dan Wicaksani, 2017).

Indikator pembangunan ekonomi di suatu negara tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonominya saja, melainkan harus juga memperhatikan sisi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara harus diikuti dengan pembangunan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Adapun menurut Safrianto (2018) pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Menurut Yunita, Harlen dan Kadir (2014) pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik di dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Pada dasarnya pertumbuhan dan pengembangan di dalam perekonomian merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan adanya

pembangunan ekonomi maka akan menghasilkan output berupa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan semakin baik. Dan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu dampak yang ditimbulkan apabila suatu negara mengadakan atau melakukan pembangunan di negara tersebut. Dalam lingkup ini pembangunan ekonomi bisa berupa suatu perluasan atau pengembangan dan bisa juga berupa peningkatan dari segala aktivitas atau kegiatan perekonomian di suatu negara yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat (Yunita, Harlen dan Kadir, 2014).

Perdebatan mengenai pembangunan ekonomi akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti. Setiap negara memiliki sikap dan pandangan tersendiri untuk mewujudkan dan mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya. Banyak pihak berpendapat bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial pada seluruh lapisan masyarakat harus memperhatikan karakteristik daerah seperti perbedaan budaya, kepercayaan, kekayaan daerah dan lain sebagainya. Perbedaan ini mengharuskan pengaturan yang berbeda pula. Artinya, hal ini hanya mungkin terlaksana dalam pemerintahan desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup penting untuk membangun ekonomi daerahnya (Iestari Agusalm, 2016).

Menurut Todaro (1998) di banyak negara berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Keduanya merupakan hal yang penting, namun hampir sangat sulit apabila ingin mewujudkannya dalam waktu yang bersamaan. Sesuai dengan prinsip ekonomi yang bersifat *trade off*, pengutamaan salah satu akan mengakibatkan

dikorbankan pilihan yang lainnya. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi, dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya tentang bagaimana cara untuk memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melakukan dan berhak menikmati hasil-hasilnya.

Penelitian yang telah dilakukan IMF (*International Monetary Fund*) menunjukkan hasil bahwa ketimpangan distribusi pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan keberlanjutan perekonomian di suatu negara. Sebagai contoh yang nyata, apabila pendapatan orang-orang terkaya teratas di dalam penyumbang pendapatan negara meningkat sebesar 20%, akan menurunkan pertumbuhan PDB dalam jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDB hanya disumbang oleh beberapa orang teratas dan bukan orang-orang kelas menengah dan menengah kebawah. Sebaliknya, kenaikan pendapatan dari golongan bawah (kaum miskin) akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB (Norris *et al.*, 2015).

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah jumlah produksinya. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang ada pada setiap daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut berjalan lambat, dan sebaliknya pada daerah yang diimbangi dengan penambahan kesempatan

kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami peningkatan. Hal ini akan menimbulkan salah satu masalah perekonomian yang baru yang sering terjadi yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di suatu negara tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang luas (Arif dan Wicaksana, 2017).

Dengan terjadinya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia yang tidak diikuti dengan faktor-faktor pendukungnya secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya fenomena ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti literatur akademik yang telah banyak membahas mengenai fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang muncul akibat berbagai faktor dan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengembangan juga merupakan salah satu faktor timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan (Prastowo, 2018).

Selain itu produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah A yang tidak diikuti peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya produksi pada daerah A sedangkan daerah B tidak. Hal yang selanjutnya akan terjadi adalah produksi di daerah A semakin cepat dan pesat mengalami peningkatan, sedangkan di daerah B produksi berjalan lambat. Jika kejadian seperti ini terus dibiarkan maka akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di tiap wilayahnya (Putri, Amar dan Aimon, 2015).

Ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan kemiskinan dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah utama perekonomian di setiap negara terutama bagi negara berkembang. Kemiskinan merupakan salah satu masalah perekonomian yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia sekalipun di negara maju. Perbedaan utama dari ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan terletak pada objek utama yang dibahas dan batasannya. Menurut Prastowo (2018) fokus pembahasan ketimpangan pendapatan sangatlah luas karena dapat menggambarkan kondisi masyarakat pendapatan golongan kaya, sedang dan miskin. Sedangkan fokus yang dibahas pada kemiskinan terletak pada masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan secara absolut (contoh: minimal konsumsi kalori) dan secara relatif (contoh: gaya hidup di lingkungan masyarakat). Namun, pada dasarnya seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila penghasilan yang didapat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dasar, dan rumah yang layak.

Di lain pihak, masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah meningkatnya pendapatan negara tanpa diikuti oleh pemerataan, sehingga terjadi ketimpangan. Hal ini terlihat dari golongan-golongan yang menerima sebagian besar dari pendapatan negara tersebut merupakan golongan kaya. Fenomena ini menjadikan golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin tetap miskin dikarenakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Bila golongan kaya memberikan partisipasi yang besar

dalam peningkatan pendapatan negara, maka golongan kaya juga akan mendapatkan manfaat atau timbal balik yang besar dari apa yang mereka sumbangkan. Namun, apabila semua lapisan masyarakat ikut menyumbang dan berpartisipasi untuk meningkatkan pendapatan negara, maka manfaatnya akan jauh lebih terasa dan merata (Kuncoro, 1997).

Mengukur tingkat ketimpangan di suatu negara dapat dilakukan dengan perhitungan atau berdasarkan indikator suatu indeks. Salah satu indikator yang selama ini digunakan adalah Gini Rasio. Adapun indikator lain untuk mengukur tingkat ketimoangan di suatu negara atau daerah adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Pada penelitian ini ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Rasio. Perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Rasio diperhitungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Jumlah Penduduk Miskin, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya merupakan salah satu hasil dan dampak nyata bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi memang tidak selalu merata dan termasuk salah satu permasalahan yang serius. Beberapa daerah memiliki rasio ketimpangan yang cukup tinggi, dimana rasio ketimpangan yang cukup tinggi menggambarkan bahwa distribusi pendapatan pada daerah tersebut kurang

merata. Adapun daerah lainnya memiliki rasio ketimpangan yang cukup rendah, hal ini menggambarkan bahwa distribusi pendapatan pada daerah tersebut tergolong cukup merata. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan maupun perbedaan pesatnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah disebabkan kurangnya sumberdaya yang dimiliki di setiap daerah (Iswanto, 2015).

TABEL 1.1.
Indeks Gini / Gini Rasio

Provinsi	Tahun		
	2016	2017	2018
DI Yogyakarta	0,3	0,30625	0,29375
Gorontalo	0,298611111	0,279861111	0,282638889
Jawa Barat	0,279861111	0,282638889	0,279166667
Sulawesi Tenggara	0,273611111	0,284027778	0,277083333
DKI Jakarta	0,286805556	0,273611111	0,273611111

Sumber : BPS

Tabel diatas menunjukkan lima provinsi dengan rasio gini terbesar dibandingkan dengan 32 provinsi di seluruh Indonesia. Indeks gini atau rasio gini menunjukkan seberapa besar tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila angka koefisien gini sebesar 0 hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan dilakukan secara merata atau disebut dengan pemerataan sempurna. Sedangkan, apabila koefisien gini sebesar 1 hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan tidak merata atau disebut dengan ketimpangan sempurna. Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir DI Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat ketimpangan yang paling tinggi. Tahun 2017 merupakan tahun dengan koefisien gini tertinggi untuk daerah DI Yogyakarta yaitu sebesar 0,30625.

Dimulai dari masa reformasi sampai dengan saat ini, pemerataan pendapatan masyarakat bukan lagi menjadi hal yang diutamakan oleh pemerintah, target capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi lah yang menjadi fokus bagi pemerintah. Dengan adanya fokus yang terpecah maka menimbulkan masalah-masalah baru seperti tingginya tingkat kemiskinan yang ada dan tingginya rasio gini sebagai indikator dari kurang meratanya pemerataan pendapatan. Hal ini menimbulkan golongan kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Yunita, Harlen dan Kadir, 2014).

Dalam islam ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang mendapat perhatian khusus terutama dalam ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, dimana prinsip islam sangat mengutamakan masalah keadilan dan kesejahteraan rakyat selama tidak melanggar norma agama. Ketimpangan pendapatan memiliki dampak dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Ostry, Berg dan Tsangarides, 2014). Oleh karena itu, setiap warga muslim sesungguhnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menolong sesama muslim dan menghindari ketimpangan distribusi pendapatan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ
اَكْمُوهُ عَدُوًّا فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰ

Yang Artinya : *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*

1

Menurut Musyarrofah (2019) islam menawarkan penyaluran distribusi pendapatan sebagaimana seharusnya supaya distribusi ini mampu disamaratakan atas seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dari sama rata dalam ayat ini adalah adil dan sesuai dengan kebutuhan seperti yang telah di uraikan dalam agama islam dalam penganjuran pendistribusian pendapatan. Hal ini ditujukan agar kekayaan dan harta tidak hanya berputar di sekeliling orang-orang yang kaya saja.

Menurut Syilviarani (2017) sumber daya merupakan faktor penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi yang dihasilkan di suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Perkembangan manusia dalam hal ini juga bisa dilihat melalui distribusi pendapatan yang ada di daerah tersebut dan tingkat pendapatan. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik juga akan berpengaruh pada output daerah tersebut melalui kemampuan mengelola dan menyerap sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah bisa dilakukan dengan melihat nilai indeks pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah, IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Semakin tinggi indeks pembangunan suatu daerah maka sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut semakin baik dan mampu dialokasikan dengan efektif. Jika terjadi perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia antara satu daerah dengan daerah lainnya maka hal ini jelas menunjukkan perbedaan kualitas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak perbedaan Indeks Pembangunan Manusia di antar wilayah maka akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan (Todaro, 1998).

Selanjutnya selain Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka juga dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi. Orang-orang yang sudah masuk atau tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya yang bisa disebut sebagai pengangguran. Apabila dilihat dari sudut perorangan, pengangguran menimbulkan masalah sosial dan ekonomi kepada siapa yang mengalaminya. Pengangguran berakibat pada terjadinya pengurangan konsumsi dikarenakan tidak ada pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang. Hal ini juga mampu mengurangi dan mengganggu tahap kesehatan keluarga (Sukirno, 2006).

Di Indonesia tingkat pengangguran berdasarkan lokasi terhitung cukup tinggi. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya adalah Aceh pada tahun 2015 memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,93%. Sementara itu,

provinsi lain di Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka dibawah 9,93% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh pada tahun 2015. Dengan nilai rasio gini yang dimiliki oleh Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 0,2337 dimana ketimpangan masuk dalam kategori yang rendah.

Faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi nilai ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah maupun suatu negara adalah Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) untuk tingkatan daerah dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkatan negara. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dapat dikatakan mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang berkembang adalah ketika tingkat segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi mencapai nilai yang lebih tinggi dari periode sebelumnya baik secara tahunan, semester, kuartal, maupun triwulan (Isnaeni, 2017).

Menurut Rinjani (2018) secara agregat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi yang didapatkan antar daerah mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat, karena setiap daerah memiliki perbedaan dalam akumulasi modal yang masuk di daerah tersebut, pertumbuhan penduduk yang berbeda, dan kemajuan teknologi yang berbeda pula. Secara teori semakin tinggi tingkat pendapatan

yang dicapai masyarakat, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraannya. Jika dilihat dari nilai PDRB yang paling tinggi dari data yang digunakan Provinsi Riau memiliki nilai PDRB pada tahun 2018 sebesar RP 755.274,29 milyar dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,234 yang tergolong kategori ketimpangan rendah.

Selanjutnya pengeluaran pemerintah daerah juga ikut memberikan peran dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Dalam pembangunan nasional anggaran pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan menyeluruh baik fisik maupun non fisik. Menurut Rosmeli (2014) peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan ketimpangan makin dirasa sangat penting. Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah melalui anggaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang telah dialokasikan untuk belanja daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan antar daerah di provinsi seluruh Indonesia.

Dilihat dari aspek ekonomi, realisasi kebijakan otonomi daerah mengharuskan adanya pendistribusian kekayaan secara adil dan proporsional antara daerah dan pusat. Adanya kebijakan otonomi daerah mengakibatkan munculnya konsekuensi *political will* untuk melakukan penyebaran kekuasaan (*dispersed of power*) yang menjadi suatu tuntutan

global, di mana peranan publik menjadi semakin kuat peranannya dalam proses pengambilan keputusan (Yuliadi, 2001).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Sebagai contoh menurut Putri, Amar dan Aimon (2015) tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di daerah B maka daerah A akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah B. Oleh karena itu, ini akan mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan antara wilayah A dan B. Pada tahun 2014 tingkat ketimpangan di Provinsi Gorontalo memiliki nilai gini rasio sebesar 0,3004 yang mana termasuk kedalam kategori sedang dengan nilai Investasi Dalam Negeri pada tahun tersebut sebesar 45,12 milyar rupiah. Kemudian, di tahun 2015 Provinsi Gorontalo memiliki nilai ketimpangan berdasarkan Gini rasio sebesar 0,2851 yang mana masuk kedalam kategori ketimpangan yang rendah dengan nilai investasi dalam negeri sebesar 94,31 milyar rupiah. Hal ini sesuai dengan teori dimana semakin tinggi jumlah investasi di suatu daerah dapat mengurangi nilai ketimpangan di daerah tersebut.

Adapun besar investasi yang diperhitungkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai investasi dalam negeri dan investasi asing. Setiap provinsi di seluruh Indonesia memiliki nilai investasi yang berbeda-beda tiap daerahnya. Nilai investasi ini yang selanjutnya akan dilihat apakah akan jelas ada atau tidak pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.

Atas penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan mengenai kualitas sumber daya manusia yang berbeda tiap daerah, produktivitas tenaga kerja yang berbeda tiap daerah, pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah yang berbeda di setiap daerah serta investasi yang ditanamkan di setiap daerah yang dilihat memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka peneliti mengambil judul “DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2014-2018” sebagai judul skripsi yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai ukuran untuk menerapkan dan menjabarkan sebagian ilmu yang telah dipelajari mengenai ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang sejenis mengenai ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

4. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan untuk merumuskan dan mengambil kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.